

Analisis Rekayasa Sub-System Penunjang di Salah Satu Sentra Pertanaman Padi di Agroekosistem Lahan Rawa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

*Engineering Analysis of Supporting Sub-Systems in One of the Rice Cultivation Centers
in Swampland Agroecosystems, West Tanjung Jabung Regency*

Suharyon Suharyon^{1*)}, Busyra BS¹, Firdaus Firdaus², Zubir Zubir²
¹Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Provinsi Jambi, Jambi, Indonesia
²Pusat Riset Ekonomi Prilaku dan Sirkuler, Indonesia
^{*)}Penulis untuk korespondensi: suharyonhariyon@gmail.com

Sitasi: Suharyon S, BS Busyra, Firdaus F, Zubir Z. 2022. Engineering analysis of supporting sub-systems in one of the rice cultivation centers in swampland agroecosystems, West Tanjung Jabung Regency. *In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-10 Tahun 2022, Palembang 27 Oktober 2022.* pp. 189-198. Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

ABSTRACT

In an effort to develop farming systems and rice plant institutions in an area, it is necessary to approach the relationship between farmer groups and other supporting institutions. With the establishment of good institutional cooperation, problems faced by farmers can be submitted and it is hoped that technology diffusion will occur through related institutions or institutions in the region. By empowering institutions that support the adoption of technology provided to farmer groups FSA (Farming System Analysis) in the form of cooperation, it will help solve the problems faced by farmers. Based on this thought, it is necessary to study the analysis of institutional engineering supporting rice farming technology. This activity was carried out in the village of Rawa Medang, Tanjung Jabung Barat Regency, with the aimed of finding effective treatments/interventions and increasing empowerment, as well as institutional cooperation to ensure the adoption of sustainable rice farming system technology. The methodology used in this activity is by applying the Participatory Research Appraisal (PRA) method, to explore the problems faced by rice farmers. Alternative interventions are the formation of several farmer groups or can be called Gapoktan which is named Joint Venture, a brief discussion about the rice farming system, seeing the urgent needs of farmer groups, and connecting them with supporting institutions. Based on the results of the PRA, the prioritized problems are (1) Acid sulphate soil, (2) Water management, (3), rat/planthopper pests, (4) Labor, (5) Capital, (6) Technical guidance for rice and rice plants. (7) Obtain subsidized fertilizer. The aimed is to find effective treatments/interventions and increase empowerment, as well as institutional cooperation to ensure the adoption of sustainable rice farming system technology.

Keywords: institutional, rice plant, agroecosystem

ABSTRAK

Dalam upaya mengembangkan sistem usahatani dan kelembagaan tanaman padi di suatu wilayah diperlukan pendekatan hubungan antara kelompok tani dengan kelembagaan lain yang mendukung. Dengan terjalinnya kerja sama kelembagaan yang baik, masalah yang dihadapi petani bisa diserahkan sekaligus diharapkan terjadi difusi teknologi melalui lembaga atau institusi terkait di daerah. Dengan memberdayakan kelembagaan yang

mendukung adopsi teknologi yang diberikan kepada kelompok tani FSA (*Farming System Analysis*) dalam bentuk kerja sama akan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi petani. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan kajian analisis rekayasa kelembagaan penunjang teknologi usahatani tanaman padi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan tujuan menemukan perlakuan/intervensi yang efektif dan meningkatkan pemberdayaan, serta kerja sama kelembagaan guna menjamin adopsi teknologi sistem usahatani tanaman padi lahan rawa yang berkelanjutan. Metodologi yang digunakan dalam kegiatan ini dengan menerapkan metode *Participatory Research Appraisal* (PRA), untuk menggali masalah yang dihadapi oleh petani tanaman padi. Alternatif intervensi yaitu dibentuknya beberapa kelompok tani atau dapat disebut Gapoktan yang diberi nama Usaha Bersama, diskusi singkat tentang sistem usahatani tanaman padi lahan rawa, melihat kebutuhan mendesak kelompok tani, dan menghubungkannya dengan lembaga pendukung. Berdasarkan hasil PRA maka permasalahan yang diprioritaskan adalah (1) Tanah sulfat asam, (2) Tata air, (3), Hama tikus/wereng, (4) Tenaga kerja, (5) Modal, (6) Bimbingan teknis untuk tanaman padi dan (7) Mendapatkan pupuk subsidi. Tujuan penelitian menemukan perlakuan/intervensi yang efektif dan meningkatkan pemberdayaan, serta kerja sama kelembagaan guna menjamin adopsi teknologi sistem usahatani tanaman padi yang berkelanjutan.

Kata kunci: kelembagaan, tanaman padi, agroekosistem

PENDAHULUAN

Peran Lembaga Pembiayaan bagi petani sangatlah penting, karena lembaga pembiayaan banyak mendukung kegiatan usahatani. Dalam pembangunan pertanian Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan salah satu provinsi yang penduduknya sebagian adalah petani yaitu provinsi Jambi. Sektor pertanian di Provinsi Jambi meliputi sub sektor perkebunan, tanaman pangan dan Hortikultura, dan perikanan. Sub sektor Pangan dan Hortikultura ini banyak diusahakan di Provinsi Jambi khususnya daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi (Anonim, 2015).

Kelembagaan dan petani merupakan satu struktur yang tidak bisa dipisahkan. Semua usahatani tanaman pangan, sayuran/buah-buahan yang dilakukan sejak dahulu hingga sekarang ada kaitannya dengan kelembagaan, baik kelembagaan petani, pemerintah maupun swasta. Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya Desa Rawa Medang merupakan salah satu sentra tanaman padi di Agroekosistem lahan irigasi yang biasa disebut lahan irigasi teknis. Tanaman padi ini sangat cocok diusahakan di daerah ini, khususnya Desa Rawa Medang Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di daerah Desa Rawa Medang merupakan salah satu sentra penghasil padi yang biasa disebut Agroekosistem yang sesuai untuk tanaman padi apalagi didukung oleh lahan irigasi teknis. Di daerah ini boleh dikatakan hampir semua lahan sawah dapat digunakan untuk budidaya tanaman padi sehingga produksi lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain.

Di Desa Rawa Medang, Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat beberapa lembaga yang dulu disebut KUD, sekarang berubah menjadi Gapoktan Usaha Bersama yang merupakan lembaga pembiayaan yang dapat mendukung kegiatan usahatani hasil pertanian salah satu contoh padi/sayuran/buah-buahan. Kelembagaan pembiayaan pedesaan terkadang tidak berkembang baik akibat terlalu banyaknya campur tangan yang cenderung berlebihan dari sistem birokrasi pemerintah. Tindakan ini, pada kenyataannya telah melumpuhkan sebagian kelembagaan lokal yang selama ini berkembang dan berperan di masyarakat dalam pemerataan pendapatan, termasuk

kelembagaan pembiayaan pertanian (Sudaryanto dan Syukur, 2000). Lemahnya peranan kelembagaan pembiayaan pertanian tersebut membawa konsekuensi semakin terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan (Syukur *et al.*, 2003). Di Kecamatan Batang Asam, terdapat dua jenis lembaga pembiayaan, yaitu lembaga pembiayaan formal dan lembaga pembiayaan informal.

Dalam operasionalnya usahatani padi/sayur-sayuran/buah-buahan tidak semua petani memiliki modal yang cukup. Akibat masalah ini maka perlunya peran lembaga pembiayaan yang dapat membantu petani dalam meningkatkan usahatannya. Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana peran kelembagaan pendukung dalam kegiatan usahatani padi/sayuran/buah-buahan terutama tanaman padi yang biasa disebut padi dilahan irigasi teknis, serta bagaimana strategi pengembangan usahatani padi/sayuran/bua-buahan (Nurmanaf *et al.*, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya kelembagaan yang diberdayakan adalah kelompok tani "Usaha Bersama" Desa Rawa Medang, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat". Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap produktivitas tanaman padi seperti : (1) tingkat penghasilan, tenaga kerja bertujuan mendapatkan penghasilan menghidupi dirinya beserta keluarganya secara layak, (2) jaminan sosial yang merupakan sesuatu yang dapat menambah pendapatan, (3) modal, (4) pupuk bersubsidi, (5) pertemuan antara kelompok belum maksimal. dan (6) bimbingan teknis untuk tanaman pangan perlu lebih ditingkatkan. Motivasi tenaga kerja perlu didorong untuk dapat lebih bergairah dalam melaksanakan pekerjaan sehingga menyebabkan penurunan produktivitas. Selain permasalahan tersebut diatas juga dipengaruhi oleh cuaca atau iklim, pada usahatani tanaman padi sebagian masih menggunakan benih lokal, masih belum terjadwal pertemuan dengan anggota kelompok sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan kurang serentak dan dapat menyebabkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi, disamping adanya hama keong pada saat tertentu, dan penyakit lainnya yang dapat merusak tanaman padi masyarakat (hasil wawancara dengan Kepala Desa, ketua kelompok dan beberapa anggota kelompok tani, dan Petugas Lapangan (PPL)).

Dengan demikian, tujuan penelitian adalah menemukan intervensi efektif dan meningkatkan pemberdayaan, serta kerja sama kelembagaan guna menjamin adopsi teknologi sistem usahatani tanaman padi yang berkelanjutan Tujuan menemukan perlakuan/intervensi yang efektif dan meningkatkan pemberdayaan, serta kerja sama kelembagaan guna menjamin adopsi teknologi sistem usahatani tanaman padi yang berkelanjutan (Anonim, 2012).

BAHAN DAN METODE

Pengertian dan Tahapan Kegiatan

Kelembagaan yang dimaksud dalam penelitian mencakup kelembagaan aparat desa, kelompok tani, lembaga adat, dan instansi pemerintah. Sedangkan institusi meliputi norma-norma dan perilaku petani yang berlaku di wilayah setempat, misalnya aturan-aturan yang mengatur antara patron dan klien. Sesuai dengan tujuan penelitian akan dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut (1) menerapkan metoda *Participatory Research Appraisal* (PRA) untuk menggali masalah yang dihadapi oleh petani, (2) setelah masalah disusun berdasarkan prioritas, maka dilakukan ujicoba bersama di petani sesuai dengan kemampuan petani, (3) mempelajari kebijakan yang dioperasionalkan oleh lembaga terkait, dan (4) menghubungi lembaga-lembaga terkait untuk mengemukakan masalah yang dihadapi petani.

Kebutuhan Teknologi Petani

Berdasarkan identifikasi, kebutuhan teknologi petani meliputi (1) Tanah sulfat masam, (2), Penggunaan tata air, (3) Adanya hama wereng, (4) Masih kurangnya tenaga kerja (5) Modal, (6) Bimbingan teknis masih kurang, dan (7) Mendapatkan pupuk subsidi. Peubah yang diamati adalah (1) masalah dan tantangan kelompok tani, (2) alternatif pemecahan masalah oleh kelompok tani, (3) frekuensi dan topik pertemuan antara kelompok tani dengan lembaga terkait, (4) bentuk kerja sama dengan lembaga terkait, (5) program aksi yang diterima dan ditolak, serta (6) keberhasilan program aksi.

Diagram Kelembagaan (Venn)

Diagram kelembagaan menunjukkan pandangan anggota masyarakat tentang lembaga dan organisasi lokal termasuk bagaimana hubungan masing-masing kelembagaan dan organisasi itu mempengaruhi kehidupan masyarakat di pedesaan. Diagram ditunjukkan dengan ukuran lingkaran berbeda-beda yang menunjukkan pentingnya suatu kelembagaan di pedesaan. Keterkaitan antar lembaga ditunjukkan dengan ada tidaknya kontak atau kerja sama dalam pengambilan keputusan atau adanya keanggotaan ganda. Lingkaran bersentuhan menunjukkan ada hubungan atau informasi tersampaikan antara lembaga/organisasi, sedangkan bila terdapat tumpang tindih berarti ada kerja sama dan keterkaitan atau keanggotaan ganda dalam pengambilan keputusan (Shawki 1999, Jhon Dixon 2001 & Umarjono, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

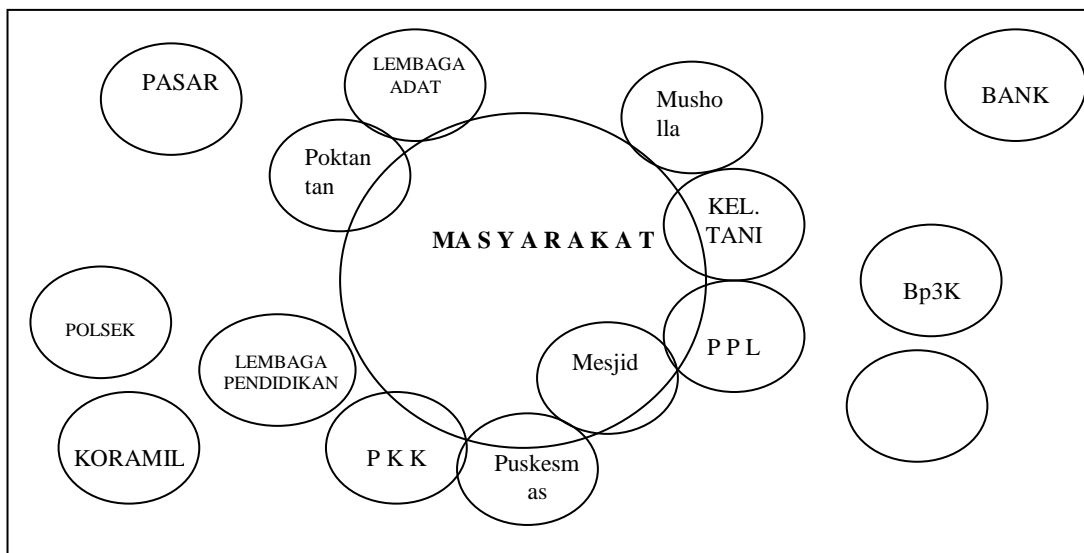
Profil Kelembagaan di Lokasi Penelitian

Kelompok tani sebagai kelembagaan petani di pedesaan pada dasarnya berfungsi sebagai wadah kerja sama, kelas belajar, sedangkan yang terkait dengan pengelolaan unit produksi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kelompok tani/Poktan Usaha Bersama di Kecamatan Batang Asam bervariasi meliputi kelas pemula, kelas madya, dan kelas lanjut. Kelompok tani yang telah terbentuk ini aktivitasnya masih kurang, karena frekuensi musyawarah/pertemuan kelompok tani masih rendah.

Koperasi unit desa (KUD) sekarang berubah menjadi Gabungan kelompok tani (Gapoktan) sesuai fungsinya sebagai pelayan masyarakat petani dalam penyediaan saprodi dan tempat simpan pinjam sangat pengaruh terhadap masyarakat berada dalam lingkaran desa. Keberadaan yang ada adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berfungsi sebagai tempat diskusi kelompok dan tidak sama fungsinya seperti KUD. Dengan demikian, LPM ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan masyarakat/petani sebagai wadah pembantu perekonomian di pedesaan. Adanya kios-kios saprodi yang menyediakan sarana produksi juga dirasakan masyarakat/petani sebagai suatu untuk mendapatkan benih bersertifikat dan pupuk. Kendala yang dihadapi petani adalah pengaruh cuaca atau iklim sehingga berpengaruh untuk pertumbuhan usahatani tanaman padi mereka, kekurangan modal untuk membeli kebutuhan sehari-harinya, dan kondisi seperti ini merupakan kendala dalam mengatasi permodalan petani terutama fasilitas kredit usahatani. Kelembagaan pendidikan yang tersedia di Desa Rawa Medang Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjab Barat yang dirasakan sangat besar peranannya, seperti: Sekolah taman kanak-kanak (TK) 1 buah, Sekolah Dasar (SD) 1 buah, mesjid 2 buah, Madrasah 1 buah, musholla 1 buah, pesantren 1 buah, dan pasar masarakat. Tersedianya mesjid dan musholla sebanyak 1 buah tersebut sangat besar peranannya menjalankan bagi umat muslim sebagai sarana dalam menjalankan peribadatnya.

Rekayasa Kelembagaan

Rekayasa kelembagaan adalah upaya yang harus dilakukan dalam rangka membentuk suatu organisasi yang sesuai dengan kebutuhan petani dalam melaksanakan sistem usahatannya. Hal yang penting adalah memfungsikan organisasi tersebut, sehingga keberadaan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap anggota petani sesuai dengan tujuan dan harapan anggotanya. Dengan demikian, rekayasa kelembagaan adalah membangun aspek fisik dan non fisik dari kelembagaan penunjang pembangunan pertanian di pedesaan. Keterkaitan antar kelembagaan di Kecamatan Batang Asam digambarkan pada diagram Venn berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Diagram Venn hubungan antara kelembagaan

Masalah dan Strategi Pemecahan

Dari hasil Partisipatori Rural Appraisal (PRA) yang dilakukan, diidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat setempat yang sangat mempengaruhi sumber pendapatannya. Sumber pendapatan dari masyarakat setempat adalah dari bertani, berkebun sawit, bertanam padi sawah, tanaman palawija, hortikultura, juga beternak ayam kampung lainnya. Dari hasil diskusi yang dilakukan dengan petani padi diperoleh bahwa masih ada beberapa petani yang belum bertanam tanaman lain seperti sayur sayuran padahal tanaman ini merupakan bagian penghasilan mereka selain tanaman pangan lainnya, artinya masih ada yang belum kompak dalam melakukan bertanam tanaman alternatif lain secara serentak, kecuali ada bantuan benih/bibit dari pemerintah setempat ditingkat petani. Disisi lain masih ditemukan: masih kurangnya kekompakan anggota kelompok, belum ada mendapat bantuan bibit unggul pada tahun belakang ini, kecuali bantuan dari Dinas-dinas setempat, Instansi lain sehingga mempengaruhi terhadap produktivitas, dan juga mengenai pemasaran. permasalahan utama seperti yang dibahas sebelumnya yang dihadapi masyarakat/petani adalah tanah sulfat masam, tata air, hama tikus, tenaga kerja, modal, bimbingan teknis, dan pupuk subsidi (Tabel 1).

Dari tujuh permasalahan yang telah teridentifikasi, maka dapat diprioritaskan (1) Tanah sulfat asam, (2) Tata air, (3) Hama tikus, (4) Tenaga kerja, (5) Modal, (6) Bimbingan teknis untuk petani dan (7) Pupuk subsidi. Permasalahan yang ditemukan pada tanaman padi tersebut adalah tanah sulfat masam atau adanya lapisan pirit, tata air dan tingkat penerapan bimbingan teknologi lainnya. Di samping itu, petani belum banyak melakukan sanitasi terhadap tanaman padi yang sudah ada. Oleh karena itu disarankan kepada

lembaga-lembaga penelitian yang relevan agar melakukan introduksi teknologi yang bisa mengatasi masalah tersebut diatas.

Tabel 1. Beberapa masalah pada usaha tani tanaman Padi Lahan Rawa di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjab Barat

Masalah	Kelompok				Jumlah	Prioritas
	I	II	III	IV		
Tanah sulfat msam	2	3	3	2	10	II
Tata air	3	4	3	3	13	I
Hama tikus	2	2	3	3	10	II
Tenaga kerja	2	2	3	2	9	III
Modal	2	2	1	2	7	IV
Bimbingan teknis	2	1	1	1	5	V
Pupuk subsidi	2	1	1	1	5	V

Keterangan : I = sangat penting, II = penting, III = cukup penting, IV = agak penting, V = kurang

Disamping bertanam padi juga dilakukan diskusi dengan petani terkait permasalahan sumber air terutama disawah-sawah mereka belum tertata baik yang banyak dijumpai pada usahatani adalah perawatan yang belum sesuai dengan petunjuk teknis, memiliki saluran yang belum teratur sehingga dapat mempengaruhi terhadap peningkatan produksi, setelah dilakukan diskusi dengan petani dan memberikan masukan-masukan kemereka sebagian besar petani sudah timbul kesadarannya untuk merawat tanaman padi yang sudah ada. Di samping itu, petani juga sudah banyak melakukan diskusi-diskusi dengan petugas lapang sebagai pendamping yang hampir hadir setiap hari dilokasinya. Ditambah dengan kehadiran Instansi Badan Litbang Pertanian dalam hal ini Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) akan dapat membantu lagi dari sisi teknologi, baik menyediakan benih bermutu, dan teknologi inovasi pertanian secara keseluruhan. Dari segi pemasaran juga perlu diperbaiki karena berdampak terhadap hasil, padahal hasil teknologi yang dilakukan harus didukung oleh keberadaan pasar yang memadai (Aima, 2002, Bambang Irawa et al, 2005).

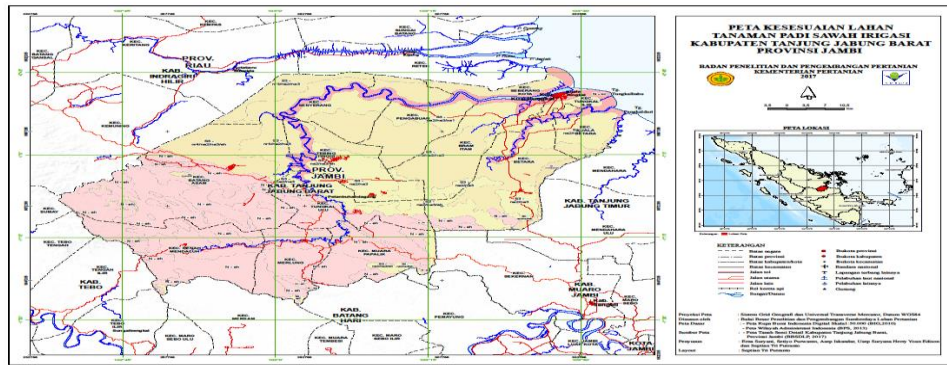
Karakteristik Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Letak Geografis

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pantai Timur Provinsi Jambi tepatnya antara 053 - 0141 Lintang Selatan dan antara 10323 - 10421 Bujur Timur (Gambar 2). Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Selat Berhala dan Kab.Tanjab Timur
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo

Sebelum dilakukan pemekaran, secara administrasi dan politik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tergabung dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ketika itu terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 120 (seratus dua puluh) desa/kelurahan. Setelah dilakukan pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Tungkal Ilir, Tungkal Ulu, Pengabuan, Betara dan Merlung dengan jumlah desa sebanyak 52 (lima puluh dua) desa dan 5 (lima) kelurahan. Luas wilayah keseluruhan adalah seluas 5.503,5 Km² atau sekitar \pm 26,68% dari total luas Provinsi Jambi. Dan untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat per kecamatan dan jumlah Kelurahan/Desa (Tabel 2).



Gambar 2. Peta : Kabupaten Tanjung Jabng Barat

Tabel 2. Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjab Barat Sebelum Pemekaran Kecamatan 2007

Kecamatan	Ibukota	Luas (Km)	Penduduk (Jiwa)	Kelurahan/Desa		
				Kel.	Ds.	Jml
Tungkal Ulu	Pela. Dagang	1.576,40	55.441	1	16	17
Merlung	Merlung	1.601,60	30.036		19	19
Tungkal Ilir	Kuala Tungkal	252,90	44.799	4	7	11
Pengabuan	Mekar Jaya	1.197,90	81.621		8	8
Betara		874,80	31.593		9	9
Jumlah				5	59	64

Sumber :Tanjab Barat dalam Angka 2017

Kondisi sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2 merupakan pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelum pemekaran kecamatan. Setelah pemekaran kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang. Jumlah Kecamatan dimekarkan menjadi 13 Kecamatan, dan Desa dimekarkan menjadi 70 desa/kelurahan.

Untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbasis pertanian dengan orientasi agribisnis dan agroindustri yang bermuara pada Ekonomi Kerakyatan, maka kabupaten ini dibagi dalam 3 (tiga) wilayah. 1.Wilayah Basah, di wilayah ini dikembangkan padi, sayur sayuran, palawija tambak/kolam keramba dan pengembangan peternakan unggas, terutama bebek.2.Wilayah Basah/Kering, pengembangan padi, palawija termasuk sayur-sayuran dan ternak seperti kambing dan ayam.3. Wilayah Kering, pengembangan ternak besar dan perkebunan. Berdasarkan klasifikasi dan luas lereng, maka wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dibagi menjadi empat klasifikasi kemiringan yaitu 0 -2% dimana wilayah yang terluas berada di Kecamatan Pengabuan dan Betara, total luas wilayah dengan kemiringan tersebut adalah 269.055 Ha atau 54,77 persen dari total wilayah Klasifikasi 2-15% seluas 147.830 Ha atau 30,09 persen dari total wilayah, kemudian klasifikasi 15 40% seluas 53.857 Ha atau 10,96 persen dan klasifikasi diatas 40 persen seluas 20.540 Ha atau 4,18 persen dari total wilayah.

Kondisi Sosial dan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang

terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang akan datang.

Kondisi ekonomi makro pada tahun 2017 dan 2018 telah memberikan fondasi yang relatif baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2009 ini. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 7,94%, namun pada tahun 2008 mengalami penurunan karena krisis global dimana harga terhadap komoditi perkebunan mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 5,99%. Demikian juga pertumbuhan sektoral kelompok primer diperkirakan juga meningkat dari 9,65% tahun 2007 menjadi 9,76% tahun 2008. Pertumbuhan sektoral kelompok sekunder dan tersier diperkirakan juga meningkat masing masing dari 6,18% dan 8,10% tahun 2007 menjadi 6,27% dan 8,31% tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2004-2008, yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas asar harga konstan tahun 2018 rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,42 persen dengan migas. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRB tanpa migas selama periode yang sama sebesar 6,60 persen pertahun. Berdasarkan data diatas, maka dapat dikatakan kontribusi sektor migas telah berkontribusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 dengan dan tanpa migas periode 2015 – 2018.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil PRA maka terdapat permasalahan yang dihadapi petani Desa Rawa Medang, Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjab Barat berdasarkan prioritasnya, berturut-turut adalah : (1) Tanah sulfat asam, (2) Tata air, (3), Hama tikus/wereng, (4) Tenaga kerja, (5) Modal, (6) Bimbingan teknis untuk tanaman padi dan (7) Mendapatkan pupuk subsidi. Seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan usahatani tanaman padi lahan rawa agar dapat berfungsi dengan baik. Kelompok tani Desa Rawa Medang, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjab Barat dalam pelaksanaan inovasi *Farming System Analysis* (FSA) sangat responsif terlihat dari pertemuan dan wawancara langsung yang dilaksanakan selama kegiatan PRA baik secara kelompok maupun individu. Keputusan petani menjalankan usahatani tanaman padi lahan rawa dapat dilakukan secara integritas baik petani itu sendiri maupun instansi terkait.

Implikasi Kebijakan

1. Usahatani padi lahan rawa di Desa Rawa Medang, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjab Barat lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi proses produksi (Pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen) dan juga pemasaran untuk menambah atau meningkatkan jumlah produksi serta pendapatan petani padi lahan rawa pada umumnya.
2. Dukungan dari Pemerintah kepada petani padi lahan rawa ataupun bantuan berupa benih agar masyarakat lebih terbantuan dalam pembudidayaan tanaman padi lahan rawa.
3. Program Penyuluhan mengenai hama dan penyakit pada petani harus ditingkatkan, bahkan perlu didampingi dengan program lain agar dapat lebih meningkatkan kelembagaan petani padi lahan rawa.
4. Kemitraan usaha antara industri/eksportir dengan petani/kelompok tani perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan. Kemitraan usaha yang diharapkan adalah kemitraan yang profesional saling menguntungkan dan tidak terbatas dan hanya pemasaran hasil tetapi termasuk teknis budidaya dan peningkatan mutu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan ini disampaikan kepada penyandang dana dan pihak-pihak terkait (lembaga maupun perorangan yang berjasa dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan naskah artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2014. Monografi desa Rawa Medang Kecamatan Batang Asam Provinsi Jambi.
- Anonimous. 2018. Rencana Kegiatan Penyuluh Desa (RKPD). Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K). Desa Makmur Jaya, Kecamatan Betra, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Anggraini A. 2016. Pendampingan koordinasi, bimbingan dan dukungan teknologi UPSUS Daging, TSP, TTP, dan Komoditas Utama Kementan, Laporan kegiatan RDHP tahun 2016.
- Anonim, 2018. Program Penyuluhan Pertanian Wilayah Kerja UPTD Jambi Selatan, 2019. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tanjung Jabung Barat.
- Anwar, Affendi. 2015. *Suatu Arah Tentang Analisis Institusi Sistem Kontrak Pertanian Wilayah Perdesaan*. Suatu Petunjuk Bagi Keperluan Penelitian Bisnis Di Wilayah Perdesaan (Tidak Dipublikasikan). Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Arifin, Bustanul. 2015. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Bambang Irawan, *et al.* 2017. Petunjuk Teknis PRA. Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian.
- Badan Litbang Pertanian. 2015. Pedoman Umum Pengembangan Taman Sains dan Teknologi Pertanian (TSTP). Badan Litbang Peternakan, Kementerian Pertanian.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Syukur M, Sugiarto, Hendiarto, Wiryono B. 2016. Analisis rekayasa kelembagaan pembiayaan pertanian. laporan akhir. pusat penelitian dan pengembangan sosial ekonomi pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor
- Budiharsono, Sugeng. 2013. *Teknik Analisis Wilayah Pesisir dan Lautan (Cetakan Pertama)*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Djaenudin, D; Y. Sulaeman dan A. Abdurachman. 2012. *Pendekatan Pewilayahan Komoditas Pertanian Menurut Pedo-Agroklimat di Kawasan Timur Indonesia*. Jurnal Litbang Pertanian, 21:1.
- Dinas Pertanian Provinsi Jambi. 2015. Sasaran Produksi Tanaman Pangan Tahun 2015
- Gumbira-Said E, Harizt Intan A. 2014. *Manajemen Agribisnis*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kusnadi U, Prasetyo LH, Sinurat AP, Hamid H, Masbulan E, Purba, Hasinah H, Priyanti A. 2015. *Pengembangan Kelembagaan Bagi Stabilisasi Usaha ayam Ras Rakyat serta Fasilitas Kemitraan Yang Lestari*. Laporan Penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pusat Penelitian Peternakan. Bogor.
- Semiaji. 2011. Strategi Pembangunan Masyarakat Melalui Pelibatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Bunga Rampai Administrasi Publik. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

- Swastika DKS. 2012. Beberapa teknik analisis dalam penelitian dan pengkajian teknologi pertanian. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*. Volume 7 Nomor 1 Puslitbang Sosial Ekonomi. Bogor.
- Suharyon, Susilawati A, Wahyudi E. 2016. Analisis rekayasa kelembagaan penunjang teknologi usahatani padi lahan suboptimal desa Karya Bakti Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. *In: Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian*, 20 Juli 2016. Banjar Baru.
- Soepadi. 2015. *Pembangunan Pertanian dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Agribisnis*. ICASERD Working Paper No. 60.
- Syukur M, Sugiarto, Hendiarto, Wiryono B. 2013. Analisis rekayasa kelembagaan pembiayaan pertanian. laporan akhir. pusat penelitian dan pengembangan soisial ekonomi pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.